

***Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat (*Index of Happiness*) di Kota Bandung**

Winda Agustina¹⁾, Widuri Wulandari²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani
Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cimahi, Jawa Barat
Email Koresponden: widuri.wulandari@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine collaborative governance in increasing the index of people's happiness in the city of Bandung. The happiness index for the city of Bandung has increased from 2014 to 2018. However, in 2019-2020 there was no measurement of the happiness index in the city of Bandung. The community happiness index in 2019-2020 can experience a decline, this is due to the impact of 10 community happiness index benchmarks in the city of Bandung. This research uses the theory from Ansel and Gash which looks at governance collaboration in 4 stages namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that: 1) the initial conditions, collaboration can be carried out by both parties according to needs, 2) there is no specific institutional design that houses the happiness index, 3) the Bandung City Cooperation Field acts as an intermediary between the government and the collaborating parties, 4) there has been a collaboration of municipal, group and individual internal governance.

Keywords: *Collaboratio,; Governance, Community Happiness Index*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung. Indeks kebahagiaan Kota Bandung mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Namun pada tahun 2019-2020 tidak ada pengukuran indeks kebahagiaan di Kota Bandung. Indeks kebahagiaan masyarakat pada tahun 2019-2020 bisa mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan terdampaknya 10 tolok ukur indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori dari Ansel dan Gash yang melihat kolaborasi pemerintahan dalam 4 tahapan yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kondisi awal, kolaborasi dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan, 2) tidak adanya desain kelembagaan khusus yang menaungi indeks kebahagiaan, 3) Bidang Kerja Sama Kota Bandung berperan sebagai pelantara antara pemerintah dengan pihak yang bekerjasama, 4) telah dilakukannya kolaborasi pemerintahan yang bersifat kota, kelompok dan internal individu.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemerintahan, Indeks Kebahagiaan Masyarakat

1. Pendahuluan

Indikator kebahagiaan di beberapa negara maju telah dijadikan sebagai indikator dalam membuat rumusan kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Indikator kebahagiaan digunakan untuk melengkapi indikator ekonomi yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat selama ini. Hansson (2006) telah melakukan penelitian yang berjudul *Economic Growth and Happiness - in the Western World Today* (pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan di dunia barat - saat ini). Penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kebahagiaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif kepada rata-rata kebahagiaan, hal itu dapat dilihat bahwa kebanyakan orang kaya lebih bahagia dibandingkan orang dengan ekonomi miskin. Lebih luas daripada itu negara-negara kaya memiliki angka tingkat kebahagiaan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang dan negara miskin.

Indikator ekonomi seperti penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi selama ini dijadikan acuan sebagai kemajuan pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dinilai belum cukup dalam memantapkan tingkat kesejahteraan secara faktual. Dengan meningkatnya fokus pada pembangunan berkelanjutan menjadikan kebutuhan dalam mengembangkan dan juga mengimplementasikan berbagai langkah sistematis mengenai kesejahteraan yang menjadi prioritas internasional (Chelli, Ciommi and Gigliarano, 2013). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Arie Kapteyn, Arthur Van Soest dan James P. Smith (2004) dengan judul "*Life Satisfaction*" menyatakan bahwa kebahagiaan yaitu sebuah gambaran dari tingkat kesejahteraan yang diperoleh setiap individu, maka indikator kebahagiaan yaitu parameter yang dapat menggambarkan suatu tingkat kesejahteraan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu kesejahteraan sosial. Hal ini telah diamanatkan dalam Pancasila, sila kelima, yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Selain itu juga terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan empat pokok tujuan pembangunan nasional yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut konstitusi di Indonesia, konsep dalam memajukan kesejahteraan umum digambarkan menjadi suatu proses pencapaian tingkat *welfare state* (negara kesejahteraan) sekaligus *progress of society* (perkembangan sosial masyarakat).

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggambarkan kesejahteraan umum bukan hanya mengarah ke arah kondisi kemakmuran material (*prosperity, welfare*) tapi juga mengarah pada suatu konsep kebahagiaan (*public Happiness, Happiness*) (Laboratorium Quality Control Departemen

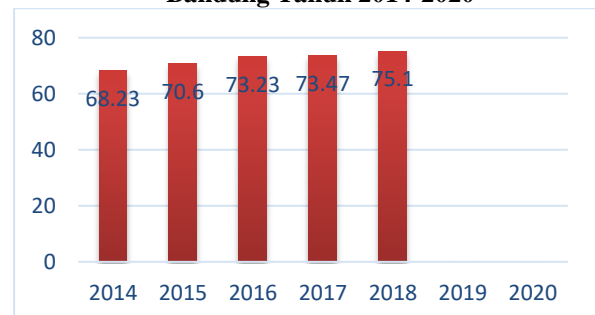
Statistika Universitas Padjajaran, 2018). Menurut Seligman (2008) kebahagiaan memiliki cakupan makna yang luas tidak hanya pada kondisi *pleasant life* (kondisi yang menyenangkan) dan juga *good life* (kehidupan yang baik) tetapi pada kondisi di mana mendapatkan *meaningfull life* (kehidupan yang bermakna). Hal ini menjadikan bahwa dalam pembangunan nasional, yang menjadi perhatian besar bukan hanya kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan material, namun juga kebahagiaan.

Aspek kebahagiaan yang diterapkan di Indonesia menerapkan antara aspek kebahagiaan menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia (BPS Kota Bandung, 2017). Menurut OECD, ada 10 aspek yang menjadi komponen utama dalam pengukuran indeks kebahagiaan yaitu: hubungan sosial, keharmonisan keluarga, kesehatan, ketersediaan waktu luang, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, kondisi rumah dan aset, pendapatan rumah tangga, pendidikan, dan pekerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menjadikan 3 kategori dari 10 aspek tersebut, untuk mengukur kebahagiaan di Kota Bandung, diantaranya: pertama, kebahagiaan yang bersifat kota, yaitu berkaitan dengan keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Kedua, kebahagiaan yang bersifat kelompok, yaitu berkaitan dengan hubungan sosial, keharmonisan keluarga, kondisi rumah dan aset, dan pendapatan rumah tangga. Ketiga, kebahagiaan yang bersifat internal individu, yaitu berkaitan dengan ketersediaan waktu luang, pendidikan, pekerjaan, dan juga kesehatan.

Menurut hasil penelitian *World Happiness Report* tingkat kesedihan masyarakat dari beberapa negara (diantaranya: Australia, Kanada, Brazil, Hong Kong, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Malaysia, Prancis, dll) pada tahun 2020 meningkat 10% dibandingkan tahun 2017-2019, dan tingkat kecemasan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 8% dibandingkan dengan tahun 2017-2019.

Grafik 1.1 Angka Indeks Kebahagiaan Kota Bandung Tahun 2014-2020



Sumber: Lab Quality Control Departemen Statistika Universitas Padjajaran Tahun 2014 dan Tahun 2018 & Badan Pusat Statistik Kota Bandung Tahun 2015-2017.

Berdasarkan pada tabel di atas, bahwa indeks kebahagiaan Kota Bandung mengalami peningkatan

sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Angka indeks kebahagiaan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2014 sebesar 68,23. Lab Quality Control Departemen Statistika Universitas Padjajaran (UNPAD) melakukan pengukuran indeks kebahagiaan Kota Bandung pada tahun 2015 sebesar 70,60. Angka indeks kebahagiaan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2016 sebesar 73,27. Angka indeks kebahagiaan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2017 sebesar 73,47. Lab Quality Control Departemen Statistika Universitas Padjajaran (UNPAD) melaksanakan pengukuran indeks kebahagiaan Kota Bandung pada tahun 2018 sebesar 75,10.

Namun, pada tahun 2019-2020 tidak ada pengukuran indeks kebahagiaan di Kota Bandung dikarenakan sejak tahun 2018 Badan Pusat Statistik Kota Bandung melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) setiap 3 tahun sekali dan kembali akan melakukan pengukuran Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) pada tahun 2021. Indeks kebahagiaan pada tahun 2019-2020 bisa mengalami penurunan. Hal ini dilihat dari terdampaknya 10 tolok ukur indeks kebahagiaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan 10 aspek indeks kebahagiaan, bahwa 10 aspek tersebut meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, kesehatan dll. Maka untuk itu, berbagai bidang tersebut melibatkan banyak pihak (stakeholder) baik pemerintah maupun non pemerintah. Salah satu contohnya pada bidang ekonomi, seharusnya Pemerintah Kota Bandung melibatkan atau melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menyelesaikan persoalan pengangguran dan masyarakat terdampak PHK di Kota Bandung. Pada aspek kesehatan Pemerintah Kota Bandung bisa melakukan kolaborasi dengan pihak rumah sakit swasta atau dengan fakultas kesehatan perguruan tinggi yang ada. Dalam aspek pendidikan Pemerintah Kota Bandung bisa melakukan kolaborasi dengan pihak swasta berkenaan dengan akses internet agar lebih merata dan berkualitas.

Dari 10 aspek indeks kebahagiaan di Kota Bandung masih banyak ditemukan permasalahan, memang Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan kerja sama di berbagai sektor. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Bandung yang bertanggung jawab dan sebagai fasilitator dalam kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan pihak lainnya. Namun hasil kerja sama tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut dilihat dari berbagai permasalahan yang terjadi. Melalui *Collaborative Governance* pemerintah dan non pemerintah turut berpartisipasi aktif sehingga tingkat kebahagiaan dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, peneliti

tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Collaborative Governance* dalam meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Kota Bandung. *Collaborative governance* merupakan konsep baru sebagai pengganti dari kodenp lain dalam pengambilan kebijakan terdahulu (Pebriani and Nasyaya, 2023). Konsep *collaborative governance* yaitu hubungan yang saling berkaitan dengan beberapa pihak (Orbawati and Mukti, 2023). Kata *Governance* sendiri memiliki makna suatu tindakan, kegiatan, pengelolaan, pengarahan pembinaan di pemerintahan (Delly, 2018).

Menurut (Abdullah, 2016) *governance* merupakan proses yang baru di manajemen pemerintahan, istilah ini muncul dari adanya perubahan paradigme bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak hanya sendiri, namun adanya keterlibatan dari sektor swasta dan *civil society*. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* yaitu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga atau pemangku kepentingan lainnya untuk proses pengambilan keputusan dari semua pihak yang bersifat formal, deliberative, berorientasi pada konsensus yang memiliki tujuan untuk kepentingan publik.

Pendapat lainnya dari La Ode Syaiful Islamy H (2018) bahwa kolaborasi ke pemerintahan merupakan adanya keseimbangan kekuatan sumber daya antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, saling bergantung dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks melalui pengambilan keputusan yang kolektif dan implementasi yang berorientasi consensus. Pendapat dari Taehyon Choi dan Peter J. Robertson (2014) yang mengatakan bahwa *collaborative governance* umumnya mengacu kepada sekelompok pemangku kepentingan yang saling bergantung dan biasanya terdiri dari berbagai macam sektor yang bekerja sama untuk mengembangkan dan juga menerapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan beragam. Pengambilan keputusan kolaboratif telah digunakan dalam berbagai kondisi kebijakan yang berbeda-beda.

Penelitian ini menggunakan empat proses kolaborasi yang disampaikan oleh (Ansell and Gash, 2008) yaitu a) Kondisi awal; b) Desain kelembagaan; c) Kepemimpinan fasilitatif; dan d) Proses Kolaborasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Rukin, 2019) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat narasi dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Pemanfaatan teori guna untuk memmbarkan gambaran umum pada latar belakang dan juga pada pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini akan menganalisis fenomena terkait *collaborative governance* dalam meningkatkan indeks kebahagiaan di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara dokumentasi, pengamatan langsung di lapangan (observasi), dan wawancara secara mendalam dengan para informan.

2. Pembahasan

Kebahagiaan masyarakat yang merupakan kesejahteraan subjektif masyarakat dapat meningkat jika dikelola secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat diperlukan keterlibatan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam meningkatkan kebahagiaan masyarakat Pemerintah Daerah Kota Bandung melakukan beberapa kerja sama dengan pengampu kepentingan lainnya.

Indeks kebahagiaan pada tahun 2019-2020 bisa mengalami penurunan. Hal ini dilihat dari terdampaknya 10 tolok ukur indeks kebahagiaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Pertama, dilihat dalam aspek pekerjaan, berdasarkan (Agus Warsudi, 2021) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Kota Bandung pada tahun 2019 sebanyak 105.670 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengangguran meningkat sebanyak 147.081 orang. Salah satu dampak dari meningkatnya pengangguran yaitu turunya pertumbuhan ekonomi dan juga menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kedua, dilihat dari aspek kondisi keamanan, peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK), banyaknya pengangguran, dan permasalahan ekonomi memberikan dampak kondisi keamanan, berdasarkan (Kompas.tv, 2020) terjadi peningkatan angka kriminalitas di Kota Bandung pada tahun 2020. Perasaan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1).

Ketiga, dilihat dari aspek pendidikan, ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung, dalam Bagian Kedua Pasal (6) menyebutkan bahwa dibatasinya pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan di institusi pendidikan lainnya. Dengan peraturan tersebut maka diberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Bandung. Akan tetapi pembelajaran jarak jauh dinilai belum optimal, hal ini disebabkan pelaksanaan sistem pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik belum optimal secara keseluruhan, internet yang kurang stabil, bahkan keaktifan peserta didik yang berkurang (Artanti Zahra Adisa, 2021).

Keempat, dilihat dari aspek kesehatan, dengan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, memberikan dampak yang luar biasa pada kesehatan di Kota Bandung, berdasarkan (Covid19.BANDUNG.GO.ID, 2021) sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021, total kasus terkonfirmasi sebanyak 43.354 orang dengan rincian 41,568 orang sembuh dan 1,422 orang meninggal dunia. Kesehatan adalah keadaan kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang diakui, dan juga merupakan hak asasi manusia yang dapat mewujudkan hak-hak dasar lainnya. Orang yang sehat

akan mampu menyadari hak asasi mereka dengan baik dan berjuang ketika hak asasi manusia dilanggar. Selain itu, kesehatan adalah bagian dari kesejahteraan setiap orang.

Selain itu, berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bandung 2020 (Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2020) menunjukkan bahwa prevalensi kunjungan gangguan jiwa di Kota Bandung terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2019 sebanyak 41.531 kunjungan menjadi 43.580 kunjungan. Dengan rincian orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat pada tahun 2019 sebanyak 3.041 (86,54%) dari sasaran jumlah ODGJ berat pada tahun 2019 sebanyak 3.514 penderita. Lalu pada tahun 2020 ODGJ Berat terjadi peningkatan sebanyak 5,69% atau sebanyak 3.241 jiwa (92,23%) dari sasaran jumlah ODGJ berat pada tahun 2019 sebanyak 3.514 penderita.

Kelima, dilihat dari aspek keharmonisan keluarga, berdasarkan (Wanda Novi, 2021) selama 2020-2021 terjadi peningkatan perkara perceraian sebanyak 70-75% atau lebih dari lima ribu pasangan yang bercerai. Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung penyebab meningkatnya perkara perceraian dipicu oleh beberapa faktor antara lain: permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.

Keenam, dilihat dari aspek kondisi lingkungan, berdasarkan (Arif Budiarto, 2020) puluhan mata air di Kota Bandung pada tahun 2020 dalam keadaan darurat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung mengungkapkan bahwa hanya 67 mata air dari 160 mata air yang masih memiliki air. Kondisi tersebut disebabkan oleh rusaknya lingkungan dan alih fungsi lahan yang sebelumnya merupakan kawasan atau kawasan resapan air menjadi pemukiman serta areal bisnis.

Ketujuh, dalam aspek pendapatan rumah tangga, berdasarkan (Hani Febriani, 2020) UMK Kota Bandung tahun 2020 sebesar Rp. 3.742.276,48. Namun, pada tahun 2020 berdasarkan (Ridwan and Hafil, 2023) terjadi peningkatan harga bahan pokok di Kota Bandung mengalami kenaikan hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Bandung. Terjadinya inflasi pada bulan November 2020 ini dikarenakan adanya kenaikan indeks di berbagai sektor seperti kenaikan pada minuman, makanan, tembakau, transportasi, peralatan rumah tangga, dan lainnya (BPS Kota Bandung, 2020).

Kedelapan, dalam aspek kondisi rumah dan aset, berdasarkan (Soraya and Fitrat, 2023) terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Bandung dikarenakan belum bisa terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun berdasarkan (Jabar.antaranews.com, 2021) bahwa Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung untuk memeriksa pohon-pohon yang ada di sekitar Kota Bandung dikarenakan banyaknya pohon rentan tumbang dan patah di Kota Bandung.

Kesembilan, dalam aspek hubungan sosial, berdasarkan (bappeda.jabarprov, 2020) dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

memberikan dampak kesehatan dan sosial. Masyarakat diberikan batasan dalam berinteraksi, berlakunya pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Bekerja, beribadah, belajar dari rumah. Pemerintah menerapkan penerapan *social distancing* guna untuk menurunkan angka COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Bandung.

Kesepuluh, dalam aspek waktu luang, berdasarkan (BPS Kota Bandung, 2017) dalam aspek ketersediaan waktu luang, laki-laki cenderung memiliki waktu luang yang lebih sedikit daripada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai indeks subdimensi kepuasan hidup personal yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan.

Dari kesepuluh permasalahan yang terjadi di Kota Bandung ini, bisa menurunkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung.

KONDISI AWAL

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu kesejahteraan. Pemerintah Daerah Kota Bandung berupaya dalam meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan subjektif masyarakatnya, hal tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya pengukuran terhadap indeks kebahagiaan masyarakatnya. Selain itu secara nasional dilakukan pula survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) setiap 3 tahun yang bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat mengenai apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada tanggal 27 Desember 2021 telah publikasikan hasil pengukuran indeks kebahagiaan masyarakat level nasional oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan hasil yang dikeluarkan Provinsi Jawa Barat menempati posisi ke 5 dari bawah dengan angka indeks kebahagiaan masyarakat sebanyak 70,23, hal tersebut menunjukkan bahwa indeks kebahagiaan di Jawa Barat berada di bawah nilai indeks kebahagiaan masyarakat nasional yakni 71,49. Badan Pusat Statistik Kota Bandung tetap melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) akan tetapi hal tersebut hanya menyajikan data dengan level estimasi provinsi, hal itu dikarenakan kurangnya jumlah sampel yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung untuk menentukan angka indeks kebahagiaan masyarakat pada level kota.

Kondisi awal dari kolaborasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yaitu dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan semaksimal mungkin agar meningkatkan kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan berbagai pihak didasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Awal kolaborasi dalam meningkatkan kebahagiaan di Kota Bandung bisa saja diawali oleh dua belah pihak, yang artinya bisa diinisiasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan

kebutuhan atau bisa pula dari stakeholder yang memiliki inovasi dan menawarkan diri ke Pemerintah Daerah Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu berkaitan dengan indeks kebahagiaan yang bersifat kota hal ini berkaitan dengan dilakukannya kolaborasi mengenai kondisi lingkungan yang ada di Kota Bandung, dan yang bersifat kelompok hal ini berkaitan dengan dilakukannya kolaborasi mengenai peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat Kota Bandung dengan meningkatkan UMKM yang ada di Kota Bandung. Kondisi awal kolaborasi berbagai pihak di Kota Bandung yang berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan masyarakat telah dilakukan dengan cukup baik.

DESAIN KELEMBAGAAN

Dalam desain kelembagaan para stakeholder diminta untuk terlibat dalam negosiasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kolaborasi pemerintahan sebagai suatu konsensus yang memiliki orientasi, meskipun terkadang konsensus tersebut tidak selalu tercapai. Maka dalam desain kelembagaan ini para pemangku kepentingan diharapkan agar dapat membagi dan memahami hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yang berkenaan dengan peraturan dasar dan tata laksana dalam suatu proses kolaborasi yang legal, transparan, partisipan yang inklusif dan juga forum yang inklusif.

Mengenai desain kelembagaan proses kolaborasi pemerintahan dalam upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, maka dapat diketahui bahwa dilakukan berdasarkan dengan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang dituangkan dalam disposisi. Disposisi tersebut merupakan suatu sikap dari Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan secara bersungguh-sungguh sehingga kerja sama tersebut dapat direalisasikan. Dengan diterbitkannya disposisi ini, pihak yang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak diketahui bahwa desain kelembagaannya tidak terintegrasi dalam suatu kelembagaan. Tidak adanya desain kelembagaan yang ada di Kota Bandung yang berkaitan dengan indeks kebahagiaan. Hal ini dikarenakan kerja sama Pencapaian Indeks Kebahagiaan dilakukan oleh semua lembaga dan dinas di Kota Bandung. Semua dinas di Kota Bandung diharuskan dapat mencapai visi misinya, hal ini berhubungan dengan indeks kebahagiaan dari masyarakat.

Proses kerja sama dilakukan dengan permohonan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan suatu kerja sama. Setelah itu, pihak ketiga memberikan kerangka ataupun acuan kerja dan juga tujuan kerja samanya itu sendiri, setelah tiga proses tersebut dilaksanakan maka

barulah akan diterbitkan Kesepakatan Bersama (KesBer) antara pihak ketiga dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Setelah substansi Kesepakatan Bersama tersebut jelas, selanjutnya Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung mengundang kembali pihak ketiga, dinas yang bersangkutan, dan Bidang Hukum Sekretariat Kota Bandung untuk berunding membahas mengenai draft naskah kerja sama. Dalam naskah kerja sama tersebut berisi maksud dan tujuan kerja sama, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, objek kerja sama, ruang lingkup kerja sama, bagaimana pelaksanaan dari kerja sama, pembiayaan kerja sama, jangka waktu kerja sama, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar (sewenang-wenang) dan pengakhiran kerja sama. Setelah melalui proses tersebut naskah akan dikembalikan ke Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk di proses dan dibagikan kembali ke masing-masing pihak.

KEPEMIMPINAN FASILITATIF

Dalam menyukseskan suatu proses kolaborasi kepemimpinan menjadi suatu elemen penting dalam memberdayakan, merangkul dan juga melibatkan para stakeholder hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan akan terjadinya pergesekan serta rendahnya kepercayaan dalam berpartisipasi dalam suatu kolaborasi pemerintahan. Keberadaan pemimpin biasanya tergantung sesuai keadaan atau kolaborasi yang dilakukan. Kepemimpinan fasilitatif berhubungan dengan musyawarah atau perundingan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan aturan aturan dasar, pembangunan kepercayaan, dan fasilitasi perbincangan antar pemangku kepentingan dan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Kepemimpinan fasilitatif dari *collaborative governance* dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, kerja sama yang dilakukan sebagai upaya agar tidak ada pihak yang dirugikan maka, ditetapkannya hak dan kewajiban bagi para pengampu kepentingan. Para pemangku kepentingan melakukan beberapa kali pertemuan untuk menentukan berbagai poin dari kerja sama yang akan dilaksanakan. Sebagai bentuk antisipasi konflik selama dalam proses kerja sama Pemerintah Daerah Kota Bandung melegalkan naskah atau draft kerja sama tersebut oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung. Akan tetapi, dalam bentuk kepemimpinan fasilitatif dengan media massa, Pikiran Rakyat berusaha melakukan fungsinya yaitu pengawasan, kontrol sosial dan edukasi secara profesional.

PROSES KOLABORASI

Proses kolaborasi merupakan suatu elemen yang penting di mana proses kolaborasi diawali dengan perundingan yang berkaitan dengan kepercayaan masing-masing pihak. Setelah perundingan itu dilakukan maka akan terbentuk komitmen yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam suatu proses kolaborasi. Setelah adanya komitmen dari para pengampu

kepentingan memiliki pemahaman bersama dalam merumuskan permasalahan, mengidentifikasi nilai, dan menetapkan tujuan yang jelas. Maka, apabila para pengampu kepentingan memiliki paham yang sama maka akan ditentukan suatu rencana strategis dalam menjalankan proses kolaborasi tersebut.

Dalam meningkatkan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung membuat program "Mentoring Go Export Business Matching, Designer Dispatch Service and Rebranding" yang bertujuan untuk mendorong UMKM yang ada di Kota Bandung untuk melakukan ekspor sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi dari UMKM tersebut. Odora Knitwear merupakan salah satu UMKM yang mengikuti program tersebut, untuk sekarang ini Odorakitwear telah melakukan ekspor ke berbagai negara selain Indonesia seperti Malaysia dan New Zealand. Dalam proses produksi Odora Knitwear memberdayakan masyarakat Kota Bandung berdasarkan informasi yang peneliti dapat bahwa jumlah karyawan Odora Knitwear sebanyak 22 orang karyawan tetap, hal ini menunjukkan bahwa dengan program ini memberikan dampak perekonomian yang lebih luas, tidak hanya pemilik dari UMKM saja yang dapat meningkatkan perekonomiannya akan tetapi juga penyerapan karyawan. Adanya penyerapan karyawan yang dilakukan oleh UMKM di Kota Bandung, mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian.

Beberapa kolaborasi pemerintahan yang berkaitan dengan peningkatan indeks kebahagiaan yang bersifat kota, kelompok dan internal individu. kolaborasi pemerintahan antara Pemerintah Kota Bandung dengan stakeholder lainnya mengenai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat yang bersifat kota yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi keamanan di Kota Bandung dengan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bandung.

Kemudian terdapat kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi lingkungan di Kota Bandung yakni kolaborasi yang dilakukan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung dengan Universitas Telkom yang bertujuan untuk mendukung pengembangan program ketahanan pangan di Kota Bandung. Lalu terdapat kolaborasi pemerintahan dengan para pengampu kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat kelompok. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat kota yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Kereta Api Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung, lalu adapun kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Perum Bulog Cabang Bandung kolaborasi ini bertujuan untuk penyediaan

paket bahan kebutuhan pokok bagi keluarga penerima manfaat di Kota Bandung, dan terdapat juga kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia yang bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang transportasi darat di wilayah Kota Bandung.

Selanjutnya, terdapat kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan keharmonisan keluarga di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bandung dengan *Save The Children* yang bertujuan untuk optimalisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dan terakhir dalam kolaborasi yang bersifat kelompok yakni yang berkaitan dengan kondisi rumah dan aset, adapun kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjajaran yang bertujuan untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung.

Kolaborasi pemerintahan dengan stakeholder lainnya dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat internal individu. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat internal individu yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendidikan di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Muhammadiyah Bandung yang bertujuan untuk peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Bandung, lalu kemudian terdapat kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang bertujuan mengenai kegiatan penelitian dan pembangunan di Kota Bandung, lalu terdapat kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Komputer Indonesia yang bertujuan untuk peningkatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kota Bandung. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan waktu luang Pemerintah Kota Bandung melakukan kolaborasi pemerintahan dengan PT. Mahkota Permata Perdana yang bertujuan untuk pembuatan program destinasi pariwisata baru. Selain data kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2021, berdasarkan data yang peneliti dapat dari Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, terdapat beberapa kolaborasi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai stakeholder lainnya pada tahun 2020 dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020

No	Badan Hukum/ Lembaga/ Perguruan Tinggi
1	Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2	Pemerintah Kota Bandung dengan Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
3	Pemerintah Kota Bandung Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,

	Tbk.
4	Kesepakatan Bersama Antara PT. Mahkota Permata Perdana dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Pendirian Mal Pelayanan Publik Kota Bandung di Kawasan Summarecon Bandung
5	Kesepakatan Bersama antara Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung (Bandung <i>Economic Empowerment Center</i>) dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung
6	Pemerintah Kota Bandung Dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
7	Perjanjian Kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandung tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Bandung Nomor : 445/23065 -Dinkes dan nomor : 885/KTR/V - 01/1219 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Bandung
8	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Pendidikan Indonesia dengan Pemerintah Kota Bandung terkait Analisis Penanggulangan Wabah Covid -19 -19 di Kota Bandung Berbasis Webgis.
9	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung (Bandung Empowerment Center) dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung tentang Uji Coba Implementas Internet of Things (IOT) di Pemerintah Daerah Kota Bandung
10	Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung (Bandung Empowerment Center) dengan Dinas Pendidikan tentang TV Satelit 132

Sumber: Dokumen Kerja Sama Bidang Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2020

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kolaborasi pemerintahan Kota Bandung pada tahun 2020 yang berkaitan dengan peningkatan indeks kebahagiaan yang bersifat kota, kelompok dan internal individu. kolaborasi pemerintahan antara Pemerintah Kota Bandung dengan para pengampu kepentingan lainnya mengenai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat yang bersifat kota yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi keamanan di Kota Bandung dengan Universitas Pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menganalisa penanggulangan wabah Covid-19 berbasis webgis di Kota Bandung. Lalu terdapat kolaborasi pemerintahan dengan para pengampu kepentingan dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat kelompok. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat kelompok yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Bandung Ekonomi Empowerment Center (Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung) yang bertujuan untuk uji coba implementasi dari *Internet of Thing* (IoT) di Kota Bandung. Terakhir terdapat kolaborasi pemerintahan dengan para pengampu kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat internal individu.

Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat internal individu yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendidikan di Kota Bandung, kolaborasi tersebut yakni kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan Bandung Ekonomi Empowerment Center (Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung) mengenai TV Satelit 132 yang sarana alternatif pembelajaran bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bandung. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan jaminan kesehatan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melakukan kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Bandung mengenai Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kolaborasi pemerintahan Kota Bandung pada tahun 2020 yang berkaitan dengan peningkatan indeks kebahagiaan yang bersifat kota, kelompok dan internal individu. Kolaborasi pemerintahan antara Pemerintah Kota Bandung dengan stakeholder terkait mengenai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat yang bersifat kota yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kondisi lingkungan di Kota Bandung dengan PT. Biofarma mengenai pembangunan fasilitas sanitasi yang terintegrasi di SDN 136 Sukawarna. Lalu terdapat kolaborasi pemerintahan dengan stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat kelompok.

Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat kelompok yakni kolaborasi yang berkaitan mengenai hubungan sosial dengan dikeluarkannya berita acara hibah serah terima Microlibrary yang berada di Kecamatan Kiara Condong Bandung. Terakhir terdapat kolaborasi pemerintahan dengan stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang bersifat internal individu. Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yang bersifat internal individu yakni kolaborasi yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendidikan Pemerintah Kota Bandung melakukan kerja sama dengan 15 perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, perguruan tinggi tersebut yakni: Universitas Kristen Maranatha, Politeknik Piksi Ganesha, Universitas Bhakti Kencana, Universitas Bandung Raya, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung, Institut Teknologi Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bandung, Universitas Islam Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Gunung Djati, Universitas Pasundan, Universitas Halim Sanusi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Immanuel Bandung, dan Universitas Kebangsaan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan data didapatkan oleh peneliti, maka diketahui bahwa terjadi beberapa proses kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai stakeholder terkait mengenai upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung baik yang bersifat kota, bersifat kelompok maupun yang bersifat internal individu. Akan tetapi, tidak semua elemen indeks kebahagiaan melakukan kolaborasi dengan pihak lain, hal tersebut perlu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakatnya.

Kolaborasi pemerintahan yang dilakukan oleh Kota Bandung sudah terjalin dengan berbagai pihak, baik dengan pihak swasta, kelompok masyarakat, perguruan tinggi maupun media massa. Namun belum semua dari kerja sama ini dilakukan evaluasi tindak lanjut dari *output* kerja sama. Perlu adanya analisis kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, jika dilihat masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *collaborative governance* dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa ada upaya dalam peningkatan Indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kolaborasi pemerintahan yang bersifat kota, bersifat kelompok dan bersifat internal individu. Akan tetapi, hal tersebut masih dirasa belum optimal karena tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dilihat dari kerja sama yang sudah dilaksanakan selama ini dengan masyarakat masih dirasa kurang terbangun, khususnya partisipasi dalam pembangunan ekonomi, juga keamanan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa kondisi awal kolaborasi pemerintahan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan di Kota Bandung yaitu bisa diinisiasi oleh kedua belah pihak, yang artinya bisa diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung atau dari stakeholder lain, tergantung kebutuhan serta inovasi. Adapun upaya awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam

meningkatkan indeks kebahagiaan yaitu dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun desain kelembagaan dalam kolaborasi pemerintahan dalam meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Selanjutnya mengenai kepemimpinan fasilitatif dari *Collaborative Governance* dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung, ditetapkannya hak dan kewajiban bagi para pengampu kepentingan. Para pemangku kepentingan melakukan beberapa kali pertemuan dalam membuat poin-poin dari kerja sama yang akan dilaksanakan. Terakhir mengenai proses kolaborasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan berbagai stakeholder yaitu telah dilakukan baik yang bersifat kota, bersifat kelompok maupun yang bersifat internal individu. Akan tetapi, tidak semua elemen indeks kebahagiaan melakukan kolaborasi dengan pihak lain, hal tersebut perlulah dijadikan suatu pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung hendaknya memperkuat komitmen dalam meningkatkan indeks kebahagiaan di Kota Bandung, dalam menciptakan program yang berkaitan mengenai peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kota Bandung
2. Pemerintah Kota Bandung perlu memanfaatkan teknologi informasi dengan menciptakan suatu aplikasi terpadu yang dapat menghubungkan para stakeholder dan dapat memperbaharui mengenai sejauh mana progress dari kerja sama yang sedang dilaksanakan.
3. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan evaluasi kerja sama yang dilakukan selama ini
4. Pemerintah Kota Bandung perlu memperhatikan program yang dilaksanakan agar dituangkan ke dalam aturan hukum yang pasti supaya memberikan keamanan mengenai hak dan kewajiban yang mengikat antar pihak.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. T. (2016) 'Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan', *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), pp. 65–72. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/83870211.pdf>.

Agus Warsudi (2021) 'Akibat Badai Pandemi Covid-19, 42.000 Warga Kota Bandung Menganggur', *iNewsJabar.id*.

Ansell, C. and Gash, A. (2008) 'Collaborative governance in theory and practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571. doi: 10.1093/jopart/mum032.

Arif Budianto (2020) 'Lingkungan Rusak, Puluhan Mata Air di Kota Bandung Kritis', *iNewsJabar.id*. Available at: <https://jabar.inews.id/berita/lingkungan-rusak-puluhan-mata-air-di-kota-bandung-kritis>.

Artanti Zahra Adisa (2021) 'Pembelajaran Jarak Jauh Efektif atau Tidak?', *kumparan.com*.

bappeda.jabarprov (2020) *Pentingnya Sosialisasi dalam Pembatasan Sosial Berskala Mikro*, *bappeda.jabarprov.go.id*. Available at: <http://bappeda.jabarprov.go.id/pentingnya-sosialisasi-dalam-pembatasan-sosial-berskala-mikro/>.

BPS Kota Bandung (2017) *Indeks Kebahagiaan 2017*. Kota Bandung.

Chelli, F. M., Ciommi, M. and Gigliarano, C. (2013) 'The Index of Sustainable Economic Welfare: A Comparison of Two Italian Regions', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 81, pp. 443–448. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.457.

Choi, T. and Robertson, P. J. (2014) 'Deliberation and decision in collaborative governance: A simulation of approaches to mitigate power imbalance', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(2), pp. 495–518. doi: 10.1093/jopart/mut003.

Covid19.BANDUNG.GO.ID (2021) *Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung*. Available at: <https://covid19.bandung.go.id/>.

Delly, M. (2018) *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Hani Febriani (2020) 'Daftar Lengkap UMK 2021 di Jawa Barat, Kota Bandung hingga Karawang Mengalami Kenaikan', *PIKIRAN RAKYAT*. Available at: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01996428/daftar-lengkap-umk-2021-di-jawa-barat-kota-bandung-hingga-karawang-mengalami-kenaikan>.

Hansson, M. (2006) 'Economic Growth and Happiness - in the Western World Today', *Globalisation and transformation in a Comparative Perspective*, pp. 41–60.

- Jabar.antaranews.com (2021) 'DPKP3 Bandung ajak warga pelihara pohon agar tak tumbang', *Jabar.antaranews.com*. Available at: <https://jabar.antaranews.com/berita/328197/dpkp3-bandung-ajak-warga-pelihara-pohon-agar-tak-tumbang>.
- Kapteyn, A., Smith, J. P. and Soest, A. van (2004) 'Life satisfaction', *Physiotherapy Practice in Residential Aged Care*, pp. 71–83. doi: 10.1016/B978-0-7506-8772-0.50007-5.
- Kompas.tv (2020) 'Kompas.tv. (2020). Waspada! Kejahatan di Kota Bandung Meningkat Selama Pandemi', *Kompas.tv*.
- Laboratorium Quality Control Departemen Statistika Universitas Padjajaran (2018) *Survei Indeks Kebahagiaan 2018 Kota Bandung*. Available at: https://issuu.com/opendatabdg/docs/survei_indeks_kebahagiaan_kota_band.
- La Ode Syaiful Islamy H. (2018) *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Orbawati, E. B. and Mukti, A. (2023) 'Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19', *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 8(1).
- Pebriani, H. and Nasyaya, A. (2023) 'Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu', *JURNALPEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 8(2), pp. 137–148.
- Ridwan, F. and Hafil, M. (2023) 'Harga Telur Ayam Naik di Bandung Jelang Ramadhan', *Republika.co.id*. Available at: <https://ramadhan.republika.co.id/berita//rrm8kp430/harga-telur-ayam-naik-di-bandung-jelang-ramadhan?>
- Rukin (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ebook)*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia.
- Seligman, M. E. P. (2008) 'Positive health', *Applied Psychology*, 57(SUPPL. 1), pp. 3–18. doi: 10.1111/j.1464-0597.2008.00351.x.
- Soraya, D. A. and Fitrat, I. (2023) 'Petugas TPS Keluhkan Penumpukan Sampah, Dukung TPA Darurat di Bandung', *Republika.co.id*. Available at: <https://rejabar.republika.co.id/berita/ru0uz9432/petugas-tps-keluhkan-penumpukan-sampah-dukung-tpa-darurat-di-bandung>.
- Wanda Novi (2021) 'Angka Perceraian di Kota Bandung Meningkat, Ternyata Ini Penyebabnya', *jabarekspres.com*. Available at: <https://jabarekspres.com/berita/2021/09/06/angka-perceraian-di-kota-bandung-meningkat-ternyata-ini-penyebabnya/>.